

Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi Kasus Dampak Penutupan Tpa Basirih Kota Banjarmasin)

Waste Management Policy Strategy by the Environmental Agency (Case Study of the Impact of the Closure of the Basirih Landfill in Banjarmasin City)

Sitna Hajar Malawat*

Abdul Halilq²

Riska Aulia Noor³

*1, 2, 3, FISIP, Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: sitna.shm@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian Untuk mengetahui Strategi dan faktor kendala dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Studi Kasus Dampak Penutupan Pemrosesan Akhir Sampah Basirih Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif. Adapun peneliti mengambil pendekatan ini karena masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan relevan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan deep interview, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 1.Strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pascapenutupan TPAS Basirih mencerminkan upaya transformasi sistem pengelolaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Strategi tersebut ditunjukkan melalui perubahan tujuan pengelolaan dari metode open dumping ke controlled landfill, pengarahan berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta tindakan konkret berupa pembangunan infrastruktur pendukung seperti TPS 3R, rumah pilah, bank sampah, dan penguatan sistem edukasi. 2. Pelaksanaan strategi ini masih menghadapi berbagai kendala. Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, belum tersedianya infrastruktur alternatif secara menyeluruh, serta dampak sosial ekonomi terhadap pekerja informal menjadi tantangan utama. Penutupan mendadak oleh KLHK menciptakan tekanan operasional tanpa persiapan memadai, memperparah risiko pencemaran lingkungan dan ketimpangan sistem pengelolaan. Selain itu, keterbatasan koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya implementasi inovasi pengelolaan seperti program 3R dan rumah pilah, menunjukkan bahwa keberhasilan strategi sangat bergantung pada peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM

Kata Kunci:

Strategi Kebijakan 1
Kebijakan Publik 2
Pengelolaan Sampah 3
Tempat Sampah 4
Sampah 5

Keywords:

Policy Strategy 1
Public Policy 2
Waste Management 3
Trash Cans 4
Trash 5

Abstract

The aim of the research is to determine the strategies and constraints in waste management by the Environmental Service (Case Study of the Impact of Closing the Basirih Final Waste Processing Plant in Banjarmasin City). Data collection techniques in this study used in-depth interviews, observation, and documentation. Based on the research results, it can be concluded that: 1. The waste management strategy of the Banjarmasin City Environmental Agency following the closure of the Basirih Landfill reflects an effort to transform the management system into a more modern and sustainable one. This strategy is demonstrated through a shift in management objectives from open dumping to controlled landfills, collaborative guidance between the government and the community, and concrete actions in the form of developing supporting infrastructure such as 3R waste disposal sites (TPS), sorting houses, waste banks, and strengthening the education system. 2. The implementation of this strategy still faces various obstacles. Lack of public awareness and participation, the lack of comprehensive alternative infrastructure, and the socio-economic impact on informal workers are key challenges. The sudden closure by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) created operational pressures without adequate preparation, exacerbating the risk of environmental pollution and inequities in the management system. Furthermore, limited cross-sectoral coordination and the suboptimal implementation of management innovations such as the 3R program and sorting houses indicate that the strategy's success depends heavily on increased synergy between the government, community, private sector, and NGOs.



PENDAHULUAN

Sampah merupakan material sisa dari suatu kegiatan manusia maupun proses alam yang tidak lagi memiliki nilai guna pada kondisi semula. Dalam konteks kebijakan nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri, serta aktivitas sosial dan ekonomi lainnya. Keberadaan sampah yang terus meningkat menjadikan pengelolaannya sebagai persoalan publik yang krusial, karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan keberlanjutan pembangunan wilayah (UU No. 18 Tahun 2008).

Permasalahan sampah semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta gaya hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Urbanisasi dan peningkatan aktivitas ekonomi mendorong bertambahnya volume sampah, baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Peningkatan daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan, termasuk produk berbasis plastik dan kemasan sekali pakai, turut memperparah persoalan persampahan di wilayah perkotaan. Armus et al. (2022) menegaskan bahwa tanpa sistem pengelolaan yang terencana dan terintegrasi, peningkatan timbulan sampah akan berdampak serius terhadap daya dukung lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan sampah yang tidak memadai tidak hanya menimbulkan persoalan teknis, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sampah yang menumpuk di lingkungan permukiman dapat menjadi sumber penyakit, menurunkan kualitas estetika lingkungan, serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi warga. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegiatan pembuangan, melainkan sebagai bagian dari kebijakan publik yang menuntut perencanaan strategis, penguatan kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Kota Banjarmasin sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Selatan menghadapi permasalahan persampahan yang cukup serius. Kondisi geografis kota yang didominasi wilayah rawa dan sungai menjadikan persoalan sampah semakin kompleks, terutama ketika sampah dibuang sembarangan ke badan air. Di beberapa kawasan permukiman, masih ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang semestinya serta keterbatasan sarana tempat pembuangan sementara. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya sampah menyebabkan perilaku membuang sampah sembarangan masih sering terjadi, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan (Putra, 2016).

Dampak dari pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Secara lingkungan, sampah dapat menyebabkan pencemaran udara dan air, mempercepat pendangkalan sungai, serta meningkatkan risiko banjir akibat tersumbatnya saluran drainase. Secara sosial, lingkungan yang kotor dan tidak sehat dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan memicu berbagai masalah kesehatan. Penelitian Khoiriyyah (2021) dan Farida et al. (2023) menunjukkan bahwa rendahnya wawasan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor utama munculnya permasalahan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

Permasalahan persampahan di Kota Banjarmasin semakin diperparah dengan kebijakan penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 1 Februari 2025. Penutupan TPAS Basirih dilakukan karena sistem pengelolaan yang masih menggunakan metode open dumping, yang dinilai tidak lagi sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan hidup dan berpotensi menimbulkan pencemaran serius. KLHK menegaskan bahwa penutupan TPAS tersebut merupakan langkah yang tidak dapat dihindari guna mencegah beban pemulihan lingkungan yang lebih besar di masa mendatang (KLHK, 2018).

Penutupan TPAS Basirih membawa dampak signifikan bagi sistem pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya volume sampah yang tidak tertangani secara optimal, sehingga memicu penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan meluasnya potensi pembuangan sampah ilegal di sungai maupun lahan kosong. Kondisi ini berpotensi memperburuk pencemaran air dan tanah serta meningkatkan risiko bencana lingkungan, khususnya banjir yang kerap terjadi akibat tersumbatnya saluran air oleh sampah (Farida et al., 2023). Selain dampak lingkungan, penutupan TPAS Basirih juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Para pemulung, pengepul, dan pekerja informal yang selama ini menggantungkan hidupnya pada aktivitas persampahan di TPAS Basirih kehilangan sumber penghidupan mereka. Tanpa adanya skema transisi kebijakan yang jelas dan inklusif, penutupan TPAS berpotensi menimbulkan masalah sosial baru, seperti meningkatnya kerentanan ekonomi kelompok masyarakat tertentu serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Siswanto & Sudrajat, 2024).

Dalam konteks kebijakan publik, pengelolaan sampah menuntut adanya kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menekankan pentingnya pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir. Regulasi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (PP No. 81 Tahun 2012).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah perkotaan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan pemerintah daerah. Strategi tersebut mencakup kejelasan tujuan kebijakan, efektivitas pengarahan kepada pelaksana dan masyarakat, serta tindakan konkret yang didukung oleh infrastruktur dan kelembagaan yang memadai.

Pengelolaan sampah berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dinilai lebih efektif dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan (Gusmawanti et al., 2021; Lisa Dwi Afri et al., 2024).

Dalam situasi krisis akibat penutupan TPAS Basirih, pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan strategi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi darurat, sekaligus mampu membangun sistem pengelolaan sampah jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Strategi kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan teknis penumpukan sampah, tetapi juga untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam strategi kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pascapenutupan TPAS Basirih. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pemerintah daerah merespons krisis pengelolaan sampah, strategi yang ditempuh dalam menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian kebijakan publik di bidang lingkungan hidup, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam strategi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pascapenutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Basirih. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada proses kebijakan, makna, serta dinamika implementasi yang membutuhkan pemahaman kontekstual berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk memotret fenomena kebijakan secara sistematis dan faktual sesuai dengan realitas yang terjadi tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian (Sugiyono, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin serta pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan sampah pascapenutupan TPAS Basirih. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah daerah, laporan resmi, serta sumber tertulis lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, penyajian data disusun dalam bentuk narasi tematik, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang hingga diperoleh temuan yang konsisten. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan data dari berbagai informan dan metode pengumpulan data, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup

Strategi pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin pascapenutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih merupakan respons terhadap tekanan ekologis, regulatif, dan sosial yang muncul akibat sistem pengelolaan lama yang masih menggunakan metode *open dumping*. Praktik *open dumping* telah lama dikritik karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan (Armus et al., 2022; UU No. 18 Tahun 2008).

Penutupan TPAS Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 1 Februari 2025 mendorong DLH Kota Banjarmasin untuk menyusun strategi baru yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemenuhan standar lingkungan nasional. Kebijakan penutupan TPA yang tidak memenuhi standar lingkungan merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong perbaikan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir (KLHK, 2018). Strategi pengelolaan sampah tersebut dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu tujuan, pengarahan, dan tindakan kebijakan, sebagaimana lazim digunakan dalam analisis strategi kebijakan publik di sektor lingkungan (Gusmawanti et al., 2021).

Dari sisi tujuan, DLH Kota Banjarmasin menegaskan perubahan visi dari sekadar pembuangan sampah menuju pengelolaan terpadu yang ramah lingkungan. Penerapan sistem *controlled landfill* menjadi langkah awal yang mencerminkan arah kebijakan baru dalam pengelolaan sampah kota. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran air, udara, dan tanah melalui pelapisan kedap air, pengelolaan lindi, serta pengendalian gas metana, sehingga lebih aman bagi lingkungan dibandingkan metode *open dumping* (Armus et al., 2022). Tujuan kebijakan ini diperkuat dengan integrasi konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pemilahan sampah dari sumber, serta pemanfaatan teknologi pengolahan seperti mesin pencacah dan rumah pilah sampah, yang dinilai efektif dalam mengurangi beban TPA dan meningkatkan nilai ekonomis sampah (Gusmawanti et al., 2021; Lisa Dwi Afri et al., 2024).

Dalam aspek pengarahan, DLH bekerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan berbagai pemangku kepentingan, seperti SKPD, LSM, dan masyarakat, dalam memberikan arahan strategis pengelolaan sampah. Arahan kebijakan ini diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, penghijauan, serta sosialisasi pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

Keterlibatan pemerintah daerah secara *top-down*, termasuk peran langsung Wali Kota dalam mendukung gerakan kebersihan lingkungan dan pemanfaatan TPS 3R, menunjukkan pentingnya kepemimpinan daerah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat (Siswanto & Sudrajat, 2024). Selain bersifat administratif, pengarahan ini juga mengandung dimensi edukatif melalui pelatihan dan pendampingan agar masyarakat memiliki keterampilan dasar dalam pengelolaan sampah (Khoiriyyah, 2021).

Tindakan konkret DLH dalam menghadapi dampak penutupan TPAS Basirih meliputi pembangunan rumah pilah, pengoptimalan TPS 3R, pemanfaatan TPS darurat melalui program *Surung Sintak*, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti saluran lindi, pengendalian gas metana, dan pelapisan tanah. Selain itu, DLH juga mendorong pengembangan bank sampah dan kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola sampah secara ekonomi produktif. Upaya ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan kemitraan multipihak dapat meningkatkan efektivitas kebijakan persampahan (Lisa Dwi Afri et al., 2024). Meskipun sebagian besar tindakan tersebut masih bersifat jangka pendek dan darurat, respons cepat dan sistematis ini menunjukkan adanya upaya transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, strategi DLH Kota Banjarmasin mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan pembuangan menuju pengelolaan sampah yang lebih holistik dan berkelanjutan. Meskipun implementasi strategi masih menghadapi berbagai tantangan, upaya ini menandai awal dari transformasi penting dalam pengelolaan sampah perkotaan di tengah krisis fasilitas pengolahan akhir.

Faktor Kendala Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan strategi pengelolaan sampah oleh DLH Kota Banjarmasin pascapenutupan TPAS Basirih tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat struktural, sosial, dan teknis. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang menyebutkan bahwa perubahan sistem pengelolaan sampah sering kali menghadapi hambatan multidimensional, terutama pada tahap implementasi kebijakan (Siswanto & Sudrajat, 2024).

Pertama, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan strategi pengelolaan sampah. Meskipun rumah pilah telah dibangun dan sosialisasi telah dilakukan, sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah yang benar. Rendahnya partisipasi publik mencerminkan lemahnya pendekatan edukatif dan berkelanjutan, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Khoiriyyah (2021) yang menekankan bahwa tingkat kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah.

Kedua, penutupan TPAS Basirih oleh KLHK dilakukan secara mendadak akibat pelanggaran sistem *open dumping*, tanpa adanya fasilitas pengganti yang siap digunakan. Penutupan yang bersifat abrupt ini menimbulkan tekanan operasional yang besar bagi DLH karena harus segera mengalihkan alur pengelolaan sampah ke lokasi lain dengan sarana yang terbatas. Kondisi serupa juga ditemukan dalam berbagai studi pengelolaan sampah daerah, di mana ketiadaan perencanaan transisi memperparah krisis persampahan (Armus et al., 2022).

Ketiga, belum tersedianya infrastruktur alternatif yang memadai menjadi hambatan serius. Pembangunan TPS 3R, rumah pilah, dan fasilitas daur ulang belum merata di seluruh wilayah Kota Banjarmasin, sehingga pengelolaan sampah hanya terfokus pada wilayah tertentu. Ketimpangan infrastruktur ini berpotensi menimbulkan *backlog* sampah dan meningkatkan beban pengangkutan, sebagaimana juga diidentifikasi oleh Gusmawanti et al. (2021) dalam kajian efektivitas TPS 3R.

Keempat, dampak sosial dan ekonomi terhadap pekerja persampahan menjadi kendala yang tidak dapat diabaikan. Penutupan TPAS menghilangkan mata pencaharian pemulung dan pekerja informal yang selama ini bergantung pada aktivitas pengelolaan sampah. Tanpa adanya program transisi ekonomi, kondisi ini berisiko meningkatkan pengangguran dan ketimpangan sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Siswanto & Sudrajat, 2024).

Kelima, tingginya risiko pencemaran dan bencana lingkungan akibat penumpukan sampah di TPS liar dan TPS darurat menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Tanpa pengelolaan lindi yang baik, pencemaran air tanah dan udara dapat terjadi, serta risiko banjir meningkat akibat tersumbatnya saluran drainase. Dampak lingkungan akibat pengelolaan sampah yang buruk ini telah banyak dilaporkan dalam penelitian sebelumnya (Farida et al., 2023).

Keenam, keterbatasan koordinasi dan inovasi pengelolaan menjadi tantangan internal yang cukup berat. Meskipun terdapat program inovatif seperti 3R dan bank sampah, kurangnya integrasi antara DLH, SKPD, sektor swasta, dan komunitas menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal. Lemahnya koordinasi lintas aktor ini sering kali menjadi penyebab utama kegagalan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah (Gusmawanti et al., 2021; Lisa Dwi Afri et al., 2024).

Secara umum, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah DLH Kota Banjarmasin masih menghadapi tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan edukasi publik, dukungan regulasi, serta pembentukan forum koordinasi lintas aktor agar strategi pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan dan mencapai target kebijakan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

I. Strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pascapenutupan TPAS Basirih mencerminkan upaya transformasi sistem pengelolaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Strategi tersebut ditunjukkan melalui perubahan tujuan pengelolaan dari metode open dumping ke controlled landfill, pengarahan berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta tindakan konkret berupa pembangunan infrastruktur pendukung seperti TPS 3R, rumah pilah, bank sampah, dan penguatan sistem edukasi.

2. Pelaksanaan strategi ini masih menghadapi berbagai kendala. Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, belum tersedianya infrastruktur alternatif secara menyeluruh, serta dampak sosial ekonomi terhadap pekerja informal menjadi tantangan utama. Penutupan mendadak oleh KLHK menciptakan tekanan operasional tanpa persiapan memadai, memperparah risiko pencemaran lingkungan dan ketimpangan sistem pengelolaan. Selain itu, keterbatasan koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya implementasi inovasi pengelolaan seperti program 3R dan rumah pilah, menunjukkan bahwa keberhasilan strategi sangat bergantung pada peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM..

REFERENSI

- Armus, R., Karim, A. (Ed.). (2022). *Pengelolaan sampah padat*. Yayasan Kita Menulis.
- Farida, A., Habsari, M. K., Fikri, M. H., Afifah, L., & Madarina, N. (2023). Pencemaran lingkungan akibat membuang sampah sembarangan dan upaya pengelolaan sampah di Kebon Rojo Kota Blitar. *Jurnal Terapan Pendidikan Dasar dan Menengah*, 3(4), 357–357.
- Gusmawanti, R. D., Iswanto, I., & Amalia, R. (2021). Pemetaan keefektifan keberadaan tempat pengolahan sampah 3R dalam mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Sleman. *Sanitasi: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 13(1), 49–56. <https://doi.org/10.29238/sanitasi.v13i1.1083>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). *KLHK ajak ibu rumah tangga kelola sampah dari sumbernya*. https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1382
- Khoiriyah, H. (2021). Analisis kesadaran masyarakat akan kesehatan terhadap upaya pengelolaan sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. *Indonesian Journal of Conservation*, 10(1), 13–20.
- Lisa Dwi Afri, L., dkk. (2024). Strategi pengelolaan sampah yang efektif di masyarakat. *Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial*, 1(3).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Putra, T. P. (2016). Dampak perilaku membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. (*Sumber sesuai rujukan dalam naskah*).
- Siswanto, N. T., & Sudrajat, Y. (2024). *Strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat*. Tesis. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.